

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penyumbang produk domestik bruto (PDB) Nasional memiliki peran yang begitu penting dalam upaya pemulihan ekonomi negara. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKopUKM) bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42 persen dari total investasi di Indonesia. UMKM termasuk kategori bisnis skala kecil yang mampu memberikan dampak besar untuk perekonomian Indonesia.

UMKM memberikan dampak yang besar bagi perekonomian Indonesia dalam mengurangi tingkat pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Berkurangnya tingkat pengangguran tentunya memiliki dampak positif bagi negara. Pemerintah pun turut memberikan bantuan kepada para pelaku usaha baik melalui pedoman pembuatan laporan keuangan hingga sektor perbankan. UMKM dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Perkembangan UMKM masih memiliki beberapa kendala, salah satunya yaitu dari sisi akses keuangan. Penyebabnya adalah keterbatasan kemampuan UMKM dalam menghasilkan laporan keuangan yang menjadi alat utama yang digunakan dalam pengajuan kredit.

Pengajuan kredit yang dilakukan oleh UMKM digunakan sebagai salah satu cara untuk mengembangkan usaha. Selain untuk melakukan pengajuan kredit kepada perbankan, UMKM juga membutuhkan laporan keuangan untuk memahami kondisi kesehatan usahanya. Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi mengenai kinerja UMKM dan berguna untuk mengambil keputusan bisnis. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu entitas yang dapat menggambarkan kinerja UMKM tersebut pada suatu periode akuntansi.

Laporan keuangan yang baik merupakan laporan keuangan yang disusun dengan relevan, andal, dapat dibandingkan, serta dapat dipahami dengan mudah. Standar pelaporan keuangan bagi UMKM saat ini menggunakan SAK EMKM. Pembukuan dengan SAK EMKM diperlukan agar laporan keuangan lebih terstruktur. Sebagian besar para UMKM hanya berfokus pada kegiatan *marketing* dan pengembangan produk saja sehingga banyak UMKM yang masih menganggap bahwa pembukuan ini tidak terlalu penting. Pembukuan pada dasarnya adalah proses penyimpanan data akurat tentang transaksi yang masuk dan keluar dari suatu usaha. Banyak manfaat yang didapat jika rutin melakukan pembukuan untuk kepentingan bisnis. Selain bisa mengetahui perkembangan bisnis yang sedang dijalankan, pelaku usaha juga bisa mengontrol biaya operasional bisnis, mengetahui jumlah hutang piutang, mengontrol aset, hingga memperhitungkan pajak.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dan sudah berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2018. SAK EMKM merupakan salah satu standar keuangan yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah dan digunakan oleh entitas yang tidak

atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK ETAP. SAK EMKM dapat dijadikan acuan bagi pelaku usaha karena disusun dengan sangat sederhana. Laporan keuangan yang wajib disusun pelaku UMKM menurut SAK EMKM terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.

Meski pun SAK EMKM tergolong sederhana, namun SAK EMKM masih jarang digunakan oleh pelaku usaha. Hal ini dikarenakan masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui SAK EMKM. Selain itu, banyak pelaku usaha yang kurang memahami penyusunan laporan keuangan dikarenakan minimnya pengetahuan tentang laporan keuangan dan tidak adanya karyawan dibagian keuangan serta karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Hal tersebut menyebabkan SAK EMKM masih jarang digunakan oleh para pelaku usaha.

*Orange laundry* merupakan sebuah UMKM yang bergerak dalam bidang jasa *laundry* yang berlokasi di Jl. Pasar V Tembung, samping Gg. Mentimun 10, Deli Serdang, Sumatera Utara. Hingga saat ini *Orange laundry* belum menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Pencatatan yang dilakukan hanya secara tradisional yang dilakukan salah seorang pegawainya yang tidak memiliki latar belakang akuntansi atau pun pernah belajar akuntansi. Dengan tidak adanya laporan keuangan, *Orange laundry* mengalami kendala dalam hal pengajuan kredit kepada lembaga perbankan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan *Orange Laundry*.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dalam penyusunan laporan keuangan keuangan *Orange laundry*?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dalam penyusunan laporan keuangan *Orange laundry*.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi peneliti**

Menjadi sarana bagi peneliti untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, serta menjadi bahan pembelajaran untuk menambah pengalaman dan pengembangan pengetahuan.

### **2. Bagi tempat penelitian**

Penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan informasi terkait penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada laporan keuangan *Orange laundry*, sehingga dapat menjadikan laporan keuangan *Orange laundry* di masa yang akan datang menjadi lebih baik lagi.

### **1.5. Batasan dan Ruang Lingkup Masalah**

Batasan dan ruang lingkup masalah bertujuan untuk mencegah penyimpangan dan pembahasan yang meluas terhadap objek masalah. Maka diperlukan batasan dan ruang lingkup masalah agar penelitian terhadap pokok masalah dapat dibahas secara mendalam.

Batasan dan ruang lingkup masalah yang telah peneliti tetapkan yaitu laporan keuangan yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).